

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE  
AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN  
2016**

Oleh:  
**Ni Kadek Ayu Trisnadewi**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 perusahaan. Data dianalisis dengan uji asumsi klasik, regresi berganda, uji koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F. Hasil analisis menunjukkan 1) Secara parsial dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap luas pengungkapan CSR. Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 adalah teruji kebenarannya. 2) Secara parsial komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap luas pengungkapan CSR. Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu komite audit berpengaruh positif dan signifikan secara parisial terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 adalah teruji kebenarannya. Dan 3) Secara simultan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 adalah teruji kebenarannya.

***Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility***

**A. LATAR BELAKANG**

Implementasi praktik tanggung jawab sosial merupakan bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap kepentingan publik.

Implementasi tanggung jawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan

terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. *Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan maupun sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab perusahaan di bidang hukum (Darwin, 2004).

Praktik implementasi CSR di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan implementasi CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selain itu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan."

CSR banyak memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Manfaat

CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai. Bagi perusahaan implementasi CSR dapat meningkatkan citra perusahaan, memperkuat *brand* perusahaan, mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, serta menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, *image* perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baik citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih

keuntungan (*profit centre*). Sebagian besar studi empiris yang menganalisis informasi tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada laporan tahunan (*annual report*), dimana *annual report* dianggap sebagai alat yang paling penting yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholders* perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2006).

Konsep *Corporate Governance* dilatar belakangi oleh masalah pengesahan antara kepemilikan dengan pengelolaan di dalam perusahaan, yang dimodelkan dengan *Agency Theory*. Dalam mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang terkait antara *corporate governance* dengan *corporate social responsibility*. Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*-nya, demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007). Pada dasarnya GCG mempunyai hubungan yang sangat erat dengan CSR dimana dalam prinsip GCG terutama *responsibility* (pertanggungjawaban) dapat diwujudkan dengan pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab

perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap dijual. Di mana hal ini dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut sehingga membutuhkan pengawasan baik dari komisaris maupun dari tim audit independen guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan mereka untuk itulah perlu dikelola dengan baik.

## B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016?

3. Apakah Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016?

### C. LANDASAN TEORITIS

#### 1. Dewan Komisaris

Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/MMBU/2002 Pasal 1 poin b, dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan. Sebagai organ perusahaan, dewan komisaris bertugas mengawasi kegiatan perusahaan dan harus memantau efektifitas praktik *corporate governance* perusahaan. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG sesuai dengan aturan. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Zarkasyi (2008).

Adanya organ-organ perusahaan (Dewan Komisaris dan Direksi) merupakan bukti

pengaplikasian prinsip GCG dalam tatanan yang minimal. Peranan penting Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi (KNKG, 2006). Menurut Egon Zehnder International (2000) dalam FCGI (2002), Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai

dengan kepentingan pemegang saham.

Ada dua jenis Dewan Komisaris yaitu komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Zarkasyi (2008) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Adanya organ-organ perusahaan (Dewan Komisaris dan Direksi) merupakan bukti pengaplikasian prinsip GCG dalam tatanan yang minimal. Peranan penting Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi (KNKG, 2006). Menurut Egon Zehnder International (2000) dalam FCGI (2002), Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 di kutip dari (FCGI, 2000). Dekemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (*bukan controlling shareholders*). Artinya persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah anggota komisaris.

Ada dua jenis Dewan Komisaris yaitu komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Zarkasyi (2008) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

## 2. Komite Audit

Komite Audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem

pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008). Tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan dan meningkatkan efektivitas fungsi *audit internal* dan *eksternal audit*.

Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal/ calon investor. Selain itu tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan.

Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada 3 bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang. Pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan

bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 di kutip dari (FCGI, 2000). Dekemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (*bukan*

*controlling shareholders*). Artinya persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah anggota komisaris.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasanyang dilakukan oleh auditor internal (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006)

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*

Pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate

Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Pengertian dan konsep *Corporate Governance* dilandasi dengan Teori Agensi (*agency theory*) dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009). Dengan adanya mekanisme *corporate governance* ini, maka tindakan kecurangan yang akan dilakukan agen dapat dieliminasi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Prinsip-prinsip GCG meliputi lima aspek yaitu: *Transparency* (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang

cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya *Accountability* (akuntabilitas) Yang di maksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

*Responsibility* (pertanggung jawaban) Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-

lainnya. *Independency* (kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Menurut Pramono dalam Sutedi (2011) Direksi dan Komisaris dipandang sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.

#### 4. *Agency Theory*

Teori agensi (*Agency Theory*) merupakan dasar yang digunakan untuk membahas *Corporate Governance*. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Teori agensi menunjukkan pentingnya pemisahan manajemen perusahaan dari pemilik kepada manajer. Tujuan sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan menyewa agen profesional dalam mengelola perusahaan. Teori agensi dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia yaitu (Eisenhardt, 1989):

Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)

Teori agensi mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham. *Agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen (Jensen dan Meckling, 1976). Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Dengan adanya masalah agensi disebabkan karena konflik kepentingan maka perusahaan harus menanggung biaya

keagenan (*agency cost*), yang terdiri dari tiga jenis yaitu:

Biaya Monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan *principal*, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen bahwa *principal* akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.

Biaya Kerugian Residual (*residual loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat perbedaan kepentingan.

Teori Agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan *principal* dapat dikurangi dengan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG).

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu : a) meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*), b) meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (*earning after tax*), c) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, d) kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*) (Bathala *et al*, 1994).

### Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). Sedangkan definisi CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development* (2011) adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. CSR timbul sejak perusahaan sadar akan *sustainability* perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar *profitability*. Dalam menerapkan CSR, umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan

(sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Ada beberapa manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR bagi perusahaan, antara lain (Taridi, 2009):

Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara *sustainable*. Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggungjawab (*good corporate citizen*) sehingga meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*). Peningkatan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.

Memudahakan akses terhadap investasi domestik dan asing. Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum. *Corporate Social Responsibility* memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tata kelola bisnisnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka pemerintah dan masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan tersebut untuk beroperasi di wilayah mereka. Citra positif ini akan menjadi asset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya saat mengalami krisis (Kotler & Nancy, 2005). Contoh bentuk tanggungjawab sosial perusahaan misalnya melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, dan pemberian sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

#### D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan menggunakan Indonesia *Capital Market Directory* (ICMD). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dengan menggunakan 60 sampel perusahaan manufaktur. Data dianalisis dengan teknik analisis data regresi, determinasi, korelasi dan uji signifikansi.

##### 1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016. Dengan mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang didalamnya memuat kewajiban pelaksanaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial baru berlaku secara efektif pada akhir 2007. Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 153 perusahaan.

##### 2. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 perusahaan manufaktur. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive judgement sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

##### Jenis data :

###### a. Data kuantitatif

Adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono,2009). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah anggota Dewan Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris Independen, jumlah anggota komite audit, dan jumlah rapat komite audit pada *annual report* perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016.

###### b. Data kualitatif

Adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2009). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah daftar perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016.

##### Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data sekunder eksternal, yaitu data yang tidak diperoleh dari sumbernya langsung tetapi diperoleh dari sumber-sumber lain, misalnya melalui dokumen (Sugiyono, 2009). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data *Annual report* tahunan perusahaan Manufaktur yang

terdaftar di BEI tahun 2016 yang diperoleh melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

2. ICMD (Indonesian Capital Market Directory) tahun 2016

## Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia, dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan manufaktur tentang Dewan Komisaris Independen, komite audit dan luas pengungkapan *cosporate social responsibility* (CSR).

## Teknik Analisis Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian yang dilakukan adalah uji Normalitas, uji Multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik dengan *Kolmogrov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogrov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* menurut Ghozali, 2009 adalah nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di bawah tingkat signifikan sebesar 0.05 (profitabilitas < 0,05) berarti bahwa variabel-variabel tersebut memiliki

distribusi tidak normal dan sebaliknya.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2009). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi kolerasi diantara variable bebas. Untuk menilai ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari: (1) *tolerance value*, (2) nilai *variance inlation factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai *tolerance value* diatas 0,1 atau VIF dibawah 10.

#### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Singgih Santoso, 2001). Cara pengambilan keputusan terkait ada tidaknya autokorelasi tersebut adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika angka D-W +di atas 2, berarti ada autokorelasi negatif.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot. Dengan dasar analisis jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali : 2009).

## 2. Analisis regresi Berganda

Model regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan penelitian dengan menggunakan *Software* SPSS versi.16.0 untuk memprediksi hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan CSR perusahaan, diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1$$

Keterangan:

Y : Indeks pengungkapan CSR perusahaan

$\alpha$  : Konstanta

X1 : Dewan Komisaris Independen

X2 : Komite Audit

e1 : *error term*

I : 1,2,...N dimana N adalah banyaknya observasi

## 3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketepatan garis regresi berganda, mencocokkan data yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) antara nol dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Jika koefisien determinasi sama dengan 0, maka dapat diartikan bahwa variabel independennya sama sekali tidak dapat mencocokkan variasi data variabel independen. Jika koefisien determinasi mendekati satu 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## 4. Pengujian Hipotesis

### 1). Uji Parsial (Uji-T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas secara individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Adapun tahap penyajiannya uji T adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan hipotesis
- b. Penentuan besarnya  $t_{\text{tabel}}$   
Besarnya  $t_{\text{tabel}}$  diperoleh dengan mengacu pada ketentuan pengujian, yaitu didasarkan pada taraf kepercayaan 95% dan taraf kesalahan (alpha 5%) dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) = n-k
- c. Menentukan besarnya  $t_{\text{hitung}}$   
 $T_{\text{hitung}}$  dapat diperoleh dengan cara melihat hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 16.0, dengan df (*degrees of freedom*)

= derajat bebas) =  $n-k$  dan  $\alpha$  (5%).

### **Pengambilan Keputusan**

Untuk memperjelas penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, yaitu yang berasumsi bahwa variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara partial terhadap variabel terikat Indeks Pengungkapan CSR perusahaan (Y) perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016, maka di bawah ini disajikan dalam bentuk kurva penerimaan atau penolakan hipotesis.

### **Uji Pengaruh Simultan (F-test)**

Uji F bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.

### **Analisis Data**

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik dengan model regresi berganda, maka sebelumnya perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk menganalisis uji asumsi klasik tersebut dilakukan dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows versi 20*. Uji asumsi klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **2. Uji Normalitas**

Uji normalitas data merupakan suatu uji statistik untuk menentukan apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Bila data setiap variabel tidak normal, maka uji hipotesis tidak dapat menggunakan statistik parametrik.

#### **3. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel *independen*. Jika variabel *independen* saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak *ortogonal* yaitu variabel *independen* yang nilai korelasinya sesama variabel *independen* sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *multikolinieritas* di dalam model regresi dalam penelitian ini, maka di gunakan program *SPSS for windows versi 20.0* dengan analisis *collinierity diagnostic*

#### **4. Uji Heterokedastisitas**

Pengujian heterokedastisitas pada prinsipnya adalah akan menguji apakah memang antar prediktor mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai residualnya. Jika nilai korelasi ini signifikan maka nilai residualnya tidak dapat diabaikan. Dalam penelitian ini digunakan *Scatter Plot* nilai residual variabel dependen. Pengambilan kesimpulan

diketahui dari memperhatikan sebaran plot data. jika sebaran data tidak mengumpul di satu sudut/bagian maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga dapat dikatakan data adalah homogeny

### 5. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 2 angka Durbin-Watson yaitu sebesar 1,737 di mana nilai tersebut terletak pada patokan nilai Durbin Watson hitung mendekati angka 2. Jika nilai Durbin Watson hitung mendekati atau di sekitar angka 2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi.

## E. PEMBAHASAN

Aanalisis pengaruh Dewan Komisaris Indevenden ( $X_1$ ) dan Komite Audit ( $X_2$ ) terhadap variabel luas pengungkapan CSR perusahaan ( $Y$ ) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia secara simultan, dengan analisis sebagai berikut :

### 1. Analisis regresi linier berganda

Berdasarkan rangkuman hasil analisis data diperoleh keterangan sebagai berikut.

$$a = 0,176$$

$$b_1 = 0,309$$

$$b_2 = 0,200$$

Dari hasil tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 0,176 + 0,309X_1 + 0,200X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Nilai konstanta sebesar 0,176 menggambarkan bahwa jika

Dewan Komisaris dan Komite Audit dianggap 0 maka Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0,176 satuan.

b. Koefisien regresi variabel Dewan Komisaris sebesar 0,309 mempunyai makna apabila Dewan Komisaris ditingkatkan (satu) satuan, maka Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia akan meningkat sebesar 0,309 satuan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara Dewan Komisaris terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

c. Koefisien regresi variabel Komite Audit sebesar 0,200 mempunyai makna apabila Komite Audit ditingkatkan (satu) satuan, maka Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia akan meningkat sebesar 0,200 satuan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara Komite Audit terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Nilai konstanta sebesar 0,176 menggambarkan bahwa jika Dewan Komisaris Indevenden dan Komite Audit dianggap 0 maka Luas pengungkapan CSR

perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0,176 satuan.

- b. Koefisien regresi variabel Dewan Komisaris Independen sebesar 0,309 mempunyai makna apabila Dewan Komisaris Independen ditingkatkan (satu) satuan, maka Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia akan meningkat sebesar 0,309 satuan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara Dewan Komisaris Independen terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
- d. Koefisien regresi variabel Komite Audit sebesar 0,200 mempunyai makna apabila Komite Audit ditingkatkan (satu) satuan, maka Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia akan meningkat sebesar 0,200 satuan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara Komite Audit terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia

## 2. Analisis Determinasi

Untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh variabel yang diteliti rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi (D) adalah  $D = R^2 \times 100\%$ . Besarnya  $R^2$

dapat diperoleh dari besarnya nilai koefisien  $R^2$ . Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh informasi tentang nilai koefisien determinasi (D) sebesar  $0,565 \times 100\% = 56,5\%$ , yang artinya bahwa Luas pengungkapan CSR dipengaruhi oleh Dewan Komisari dan Komite Audit sebesar 56,5%. Sedangkan sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada analisis ini. Untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh variabel yang diteliti rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi (D) adalah  $D = R^2 \times 100\%$ . Besarnya  $R^2$  dapat diperoleh dari besarnya nilai koefisien  $R^2$ . Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada lampiran 2 diperoleh informasi tentang nilai koefisien determinasi (D) sebesar  $0,565 \times 100\% = 56,5\%$ , yang artinya bahwa Luas pengungkapan CSR dipengaruhi oleh Dewan Komisari dan Komite Audit sebesar 56,5%. Sedangkan sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada analisis ini.

## 3. Uji signifikansi koefisien regresi secara parsial (Uji-t)

Pengujian koefisien uji parsial ini digunakan untuk melakukan pengujian secara parsial pengaruh antara statistik Dewan Komisaris ( $X_1$ ) dan Komite Audit ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang signifikan (berpengaruh nyata) terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan (Y) di Perusahaan

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan uji t.

- a. Menguji pengaruh Dewan Komisaris terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan

Oleh karena  $t_{hitung}$  (4,932)  $>$   $t_{tabel}$  (1,671) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, ini berarti secara parsial Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama tentang ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Dewan Komisaris terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan diterima.

- b. Menguji pengaruh Komite Audit terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan

Oleh karena  $t_{hitung}$  (3,056)  $>$   $t_{tabel}$  (1,671) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, ini berarti secara parsial komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua tentang ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Komite Audit terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan diterima.

Menguji pengaruh Dewan Komisaris Indevenden terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan

1. Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya Dewan Komisaris Indevenden tidak

berpengaruh signifikan terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan.

$H_1 : \beta_1 > 0$ , artinya Dewan Komisaris Indevenden berpengaruh signifikan terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan.

2. Menentukan taraf kepercayaan ( $\alpha$ ) 5 persen dan  $df = (n-k) = 60-3 = 57$ , dengan uji sisi kanan maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,671 (Lampiran 3).

3. Kriteria pengujian

Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan uji satu sisi yaitu uji sisi kanan.

Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak

Apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima

### Kesimpulan

Oleh karena  $t_{hitung}$  (4,932)  $>$   $t_{tabel}$  (1,671) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, ini berarti secara parsial Dewan Komisaris Indevenden memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama tentang ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Dewan Komisaris Indevenden terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan diterima.

### 4. Uji Signifikansi dengan Uji F

Nilai  $F_{hitung} = 10,804$  dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel} = 3,15$  maka nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $F_{tabel}$ . Ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 5% secara

statistik Dewan Komisaris ( $X_1$ ) dan Komite Audit ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang signifikan (berpengaruh nyata) terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan (Y) di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang berbunyi “Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia” adalah teruji kebenarannya.

### **KESIMPULAN**

Mengacu pada tujuan penelitian dan hasil analisis di depan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara parsial dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap luas pengungkapan CSR. Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 adalah teruji kebenarannya.
2. Secara parsial komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap luas pengungkapan CSR. Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu komite audit berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) Tahun 2016 adalah teruji kebenarannya.

3. Secara simultan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 adalah teruji kebenarannya.

### **F. SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan kepada pihak manajemen Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia adalah

1. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki peranan penting terhadap Luas pengungkapan CSR perusahaan, oleh karena itu pihak manajemen hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan peran Dewan Komisaris Indevenden serta membentuk komite audit yang profisonal.
2. Berhubung kedua faktor tersebut berpengaruh di bawah 100%, maka dipandang masih perlu untuk mengkaji faktor lain selain kedua faktor tersebut dalam kaitannya untuk melaksanakan pengungkapan CSR perusahaan di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriyati M, Sinaga. 2011. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Sektor Perbankan di Indonesia", Skripsi, Universitas Diponegoro
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, 2004. *Komisaris Independen: Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*, PT. Indeks kelompok gramedia, Jakarta.
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control Systems*. Salemba Empat: Jakarta
- Bathala, C.T et al. 1994," *Managerial ownership, debt policy and the impact of holdings: an agency perspective*" *Financial Management*, vol.23, no.3, Autumn.
- Branco, M. C dan L. L Rodrigues, 2006. "Communication of CSR by Portuguese Banks." *International Journal of Corporate Communication*, Vol. 11, No. 3, Hal. 232-248
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Penelitian Studi Kasus* [online]. Tersedia <http://www.skripsimahasiswa.blogspot.com/> [2 April 2008]
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan* (corporate governance). Jakarta
- Ghozali, Imam. 2009. *SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : kencana.
- Jensen, Michael C., dan Meckling William H. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360
- Kotler, Philip and Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility*. Amerika: Jonh Wiley & Sons. Inc
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta
- Nuryana, Mu'man. 2005. *Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*, makalah yang disampaikan pada diklat pekerjaan sosial industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan sosial (BBPPKS), Lembang, Bandung
- Singgih, Santoso. 2001. *Statistik Parametrik*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social responsibility from*

- charity to sustainability*.  
Salemba Empat. Jakarta.
- Sukrisno Agoes. 2006. *Auditing Jilid I*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi ke 10. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taridi, Tirmidzi. *Perkembangan GCG di Indonesia*. Seminar Nasional “ *Rejuvenating Our Teaching Research in Financial Accounting and Modeling GCG in Financial Accounting and Modeling GCG in Indonesia*”. Yogyakarta
- Utama, Sidharta. 2007. “Evaluasi infrastruktur pendukung pelaporan tanggung jawab social dan lingkungan di Indonesia”. *Pidato ilmiah pengukuhan guru besar FEUI*. Jakarta [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com)
- Waryanto. 2010. “Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia”, Skripsi, Universitas Diponegoro
- Yulia, Setyarini. 2011. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility*. Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung : Alfabeta.